LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DI INDONESIA

OLEH :

Drs. Azwardi, MSi

DIBIAYAI OLEH DANA DIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 2909 RT/PT11.1.1/N/2005
TANGGAL: 1 JULI 2005

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOPEMBER, 2005

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1.	a. Judul Penelitian	**Analisis Investasi pemerintah pusat di Indonesia**
	b. Bidang Ilmu	**Ekonomi**
	c. Kategori Penelitian	**Pembangunan Ekonomi**
2.	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan gelar b. Jenis Kelamin c. Pangkat/ Golongan/ NIP d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/ Jurusan f. Universitas g. Bidang Ilmu yang diteliti	 Drs. Azwardi, MSi Laki-laki III C, Penata Muda, 132 050 494 Lektor Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan Sriwijaya Ekonomi Pembangunan
3.	Jumlah Tim Peneliti	1 orang
4.	Lokasi Penelitian	Indonesia
5.	Jangka Waktu Penelitian	5 bulan
6.	Biaya yang digunakan	Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
7.	Sumber dana	DIPA Universitas Sriwijaya T.A. 2005

Inderalaya, Nopember 2005
Ketua Peneliti,

Drs. Azwardi, MSi
NIP. 132 050 494

Mengetahui :
Ketua P3EM FE UNSRI,

Dra Eka Roostartina
NIP.131 271 080

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya,

Dr. Ir. Ali yasmin Adam Wiralaga, MSc
NIP. 130 353 404

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penelitian ini dapat diselesaikan. Dalam penelitian ini dibahas mengenai variabel yang mempengaruhi alokasi Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) yang dialokasikan kepada pemerintah propinsi di Indonesia, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Akhirnya diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Wasalam,

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul	.....	i
Halaman Pengesahan	.....	ii
Kata Pengantar	.....	iii
Daftar Isi	.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	.....	4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	.....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	.....	17
DAFTAR PUSTAKA	.....	18

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Secara umum fungsi pemerintah meliputi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan tugas pemerintah menyediakan barang dan jasa, khususnya berbagai fasilitas untuk kepentingan umum. Selanjutnya pemerintah menjalankan fungsi distribusi, yakni berkaitan dengan tugas pemerintah untuk menjaga agar distribusi pendapatan antar kelompok relatif tidak timpang. Sedangkan fungsi pemerintah yang terakhir berupa fungsi stabilisasi, antara lain berupaya untuk menjaga agar tingkat harga tetap terkendali.

Ketiga fungsi pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau yang lebih dikenal dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Guna menjalankan ketiga fungsi pemerintahan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah pusat, khususnya berupa Daftar Isisan Kegiatan (DIK) dan Daftar Isisan Proyek (DIP). Alokasi DIK merupakan dokumen yang berisikan wewenang alokasi dana-dana dari mata anggaran rutin APBN, sedangkan DIP merupakan mata anggaran pembangunan.

Secara teoritis pemberian bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditentukan oleh kapasitas fiskal (fiscal capacity) dan kebutuhan fiskal (fiscal needs). Pemberian bantuan pemerintah pusat mempunyai hubungan yang

negatif dengan kapasitas fiskal, sedangkan dengan kebutuhan fiskal mempunyai hubungan yang positif. Melaui pemberian bantuan pemerintah pusat tersebut diharapkan kemampuan fiskal daerah meningkat, sehingga dapat mengurangi ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun secara horisontal.

Investasi DIK/DIP pemerintah pusat dari tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 1998/1999 di berbagai propinsi secara absolut mengalami peningkatan, namun sejak tahun 1999/2000 cenderung menurun. Investasi pemerintah pusat relatif terkonsentrasi di propinsi DKI Jakarta, pada tahun 1996/1997 investasi DIK/DIP yang diberikan kepada propinsi ini sebesar 39,54 %, namun pada tahun 2001 menurun menjadi 27,15 %. Adapun perkembangan investasi DIK/DIP pada tahun 1996/1997 sebesar 19.867.376 juta rupiah, selanjutnya pada tahun 1997/1998 sebesar 21.031.730 juta rupiah, 1998/1999 sebesar 33.900.897 rupiah, 1999/2000 sebesar 25.166.207 juta rupiah, pada tahun 2000 sebesar 25.166.207 juta rupiah dan pada tahun 2001 sebesar 20.897.391 juta rupiah.

Perkembangan investasi DIK/DIP cenderung berfluktuasi, selanjutnya fenomena tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latarbelakang permasalahan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD terhadap alokasi DIK/DIP

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD terhadap alokasi DIK/DIP di berbagai propinsi.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak yang berminat terhadap kajian keuangan negara atau keuangan daerah.

5. Ruanglingkup penelitian

Objek dalam penelitian ini dalah DIK/DIP serta dilengkapi dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD berdasarkan propinsi di Indonesia pada tahun 2000.

6. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi berganda untuk menjawab permasalahan bagaimana hubungan antara jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD dengan DIK/DIP.

Persamaan regresi yang akan diestimasi adalah sebagai berikut :

DIKDIP = a + b Penduduk + c Luas Wilayah + d Pdk Miskin + e PAD

BAB II. STUDI PUSTAKA

1. Landasan Teoritis

Berbagai teori ekonomi publik yang menjelaskan ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi biasanya merujuk kepada pendapat Musgrave (1959). Melalui fungsi alokasi pemerintah berupaya menggunakan sumberdaya yang ada untuk berbagai kepentingan dengan seefisien mungkin, termasuk penyediaan barang publik. Sedangkan melalui fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mengatur kepemilikan faktor produksi, sehingga pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi relatif lebih merata. Sementara itu melalui fungsi stabilisasi pemerintah berupaya untuk menjaga kondisi perekonomian agar tidak terlalu berfluktusai (Musgrave dan Musgrave, 1959; 5-27; Oates 1972; 3-21 dan 1999; 1120-1145; Rathin, 1997; 1-5).

Analisis Musgrave diawali dari upaya untuk mencari jawaban mengenai tingkat pemerintahan manakah yang paling tepat untuk menangani masing-masing permasalahan tersebut ?. Tentu saja yang dimaksudkan dalam pertanyaan tersebut bukan hanya menyangkut ketiga fungsi pokok itu semata, tetapi segala macam aktivitas atau fungsi pemerintah yang terkait, merujuk pada ketiganya.

Permasalahan mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah, khususnya berkenaan dengan penyediaan barang publik di berbagai negara dapat dibagi menjadi dua kelompok; pertama, negara yang menggunakan sistem sentralisasi

dan yang kedua negara yang menggunakan sistem desentralisasi (Oates, 1972; 31).

Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan yang kedua adalah preferensi. Semakin rendah eksternalitas dari pengadaan suatu barang publik maka semakin rendah pula insentif untuk dilakukannya sentralisasi, dan sebaliknya. Diyakini pula bahwa, pada dasarnya pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah (pemerintah daerah) akan lebih memahami keinginan dari masyarakat di daerahnya masing-masing. Berdasarkan kedua faktor ini, Musgrave menyimpulkan bahwa secara umum fungsi stabilisasi dan distribusi akan lebih baik bila dilakukan oleh pusat, sementara itu fungsi alokasi akan lebih baik jika didesentralisasikan.

Pendekatan tersebut pada dasarnya membahas teori mengenai intervensi negara, dan interaksi antara negara dan individu. Dalam pendekatan tersebut negara menjalankan tugasnya dengan amat baik jika ia tidak mendistorsi preferensi dari konsumen (masyarakat), karena itu tingkat desentralisasi yang optimal adalah yang meminimumkan distorsi tersebut. Argumentasi-argumentasi mereka pada dasarnya berlandaskan pada proposisi bahwa tingkat desentralisasi yang ideal adalah apabila individu dapat mengurus dirinya sendiri, kecuali jika dengan bekerjasama biaya dapat ditekan. Jadi, hanya apabila ada kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa publik baik dalam bentuk kebijakan stabilisasi

maupun barang publik yang "non-rival" dan "non-excludable" barulah pemerintah turun tangan.

Oates mengemukakan beberapa keuntungan jika pendekatan sentralisasi yang digunakan, yaitu pengendalian jumlah uang yang beredar serta stabilitas harga (perekonomian) dan penyerapan tenaga kerja relatif lebih mudah dicapai. Begitupula dengan dengan distribusi pendapatan serta efisiensi output yang dihasilkan. Sedangkan jika dalam pendekatan desentralisasi, akan timbul ketidakstabilan di bidang fiskal (ekonomi makro). Dengan demikian melalui pendekatan ini kinerja tugas yang dilaksanakan relatif lebih baik. Sementara itu keuntungan dari pelaksanaan desentralisasi; pertama preferensi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa lebih dapat diketahui; kedua timbulnya inovasi serta kompetisi antar daerah untuk menghasilkan teknik yang terbaik dalam penyediaan barang publik, sehingga menghasilkan efisiensi dalam proses produksi; ketiga tercipta lembaga yang lebih baik untuk mengambil keputusan dalam masyarakat.

Secara ekonomi tujuan pemberian tranfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Ma, 1997; 1-4 ; Oates,1999; 1120-1145) adalah :

1. Mengatasi Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance). Di sebagian besar negara di dunia, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama yang menyebabkan relatif kecilnya pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah tidak mampu untuk menutupi pengeluarannya. Transfer yang dilakukan oleh

pemerintah pusat dibutuhkan untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah daerah.

2. Mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal fiscal imbalance). Kondisi antar daerah relatif berbeda, baik dari sisi kapasitas fiskal (fiscal capacity) maupun dari sisi kebutuhan fiskal (expenditure needs). Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah antara lain disebabkan oleh perbedaan dalam kekayaan sumberdaya alam, penerimaan (pajak) utama dan PDRB. Sedangkan perbedaan kebutuhan fiskal antara lain disebabkan oleh jumlah penduduk miskin, jumlah lansia, jumlah usia muda, infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan. Perbedaan kondisi fiskal tersebut menyebabkan terjadiya "fiscal gap" yang harus diatasi dengan pemberian transfer dari pemerintah pusat.

3. Mengatasi melimpahnya efek pelayanan publik (inter-jurisdictional spill-over efect). Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki efek menyebar (eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya, misalnya pendidikan tinggi, pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem pengendalian polusi (udara dan air) dan rumah sakit daerah. Tanpa adanya manfaat (dalam bentuk pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek serupa di atas, biasanya pemerintah daerah enggan untuk berinvestasi. Oleh karena itulah pemerintah pusat perlu untuk memberikan semacam insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan publik tersebut dapat terpenuhi.

2. Penelitian Sebelumnya

a. Martin Ravallion (1988; 53-71)

Dalam penelitiannya yang berjudul ***INPRES and Inequality : A Distributional Perspective on The Centre's Regional Disbursement***, Ravallion mengidentifikasi fungsi preferensi masyarakat pusat terhadap alokasi INPRES. Selanjutnya dengan menggunakan data INPRES aggregat tahun 1985/1986 fungsi tersebut diaplikasikan sesuai dengan karakteristik daerah di Indonesia.

Terdapat dua fungsi yang dapat dipakai sebagai representasi dari preferensi masyarakat, yaitu fungsi CES dan fungsi kesejahteran Kolm-Pollak (K-P).

Setelah persamaan diestimasi, maka diperoleh persamaan regersi sebagai berikut:

$$Ln\left(\frac{I_j}{N_j}\right) = 0.909 + 1,30LnY_j - 0,65Y_j - 0,236LnN_j - 0,148LnD_j + \upsilon_j$$

$R^2 = 0,909$ SEE= 0,167 Deviasi Rata-rata = 2,49 n=26

Berdasarkan persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien Ln Y_j tidak signifikan dan koefisien Yj meskipun signifikan tetapi negatif. Sedangkan dari angka standard error dapat diketahui bahwa Ln Y dan Y mempunyai hubungan yang tinggi (r = 0,98).

Implikasi dari hasil yang diperoleh dari persamaan ( ) dapat diketahui bahwa fungsi preferensi yang lebih sesuai untuk digunakan adalah fungsi K-P

daripada fungsi CES. Selanjutnya dengan mengestimasi kembali fungsi K-P yang ditampilkan pada persamaan ( ), maka diperoleh persamaan regresi :

$$Ln\left(\frac{I_j}{N_j}\right) = 1,51 - 0,050Y_j - 0,235LnN_j - 0,152\beta_1 LnD_j + \upsilon_j$$

$$R^2 = 0,916 \qquad SEE = 0,164$$

Persamaan yang telah diestimasi relatif lebih baik karena hasilnya lebih sesuai dengan spesifikasi yang dibangun dan secara statistik koefisien Y signifikan. Guna melihat pengaruh INPRES terhadap biaya hidup, kemiskinan ketimpangan pendapatan, angka putus sekolah dan investasi, maka model tersebut diperluas.

b. **Iwan Jaya Aziz (1989)**

Iwan Jaya Aziz mengkaji peranan INPRES dalam penelitiannya yang berjudul "INPRES Role In The Reduction Of Interregional Disparity". Penelitian tersebut dianalisis dengan persamaan simultan yang menggunakan data dari duapuluh dua propinsi.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$CP_t = 20,1338 + 0,3262Y_t + 0,0334POP_t$$

$$I_t = -39,4559 - 0,0054EC_{t-1} + 0,4006Y_{t-1}$$

$$CG_t = -13,2143 + 0,0816Y_t + 0,012P_t$$

$$Y_t = K_t^{0,3506} + L_t^{0,5581}$$

$$NM_t = 0,0131YLPG_{t-3} + 0,00000875CCHD_t + 0,2164TR_t$$

$$KD_{t-1} = -175,286 + 11,0349RG_{t-4} + 33,4083YD_{t-2} + 7134,86BI_{t-4}$$

I adalah investasi

RG adalah kesenjangan pendapatan antar daerah

YD adalah perubahan GRDP

KD adalah perubahan stok kapital daerah

BI adalah alokasi INPRES antar daerah

N adalah rata-rata pertumbuhan penduduk alamiah

POP adalah jumlah penduduk

CCH adalah konsumsi rumahtangga perkapita

TR adalah jumlah transmigrasi

NM adalah tingkat migrasi neto

YLGP adalah kesenjangan per tenaga kerja-GRDP

K adalah stok kapital

R adalah tingkat pengembalian suatu daerah

EC adalah pendapatan dari kapital

CG adalah konsumsi pemerintah

CP adalah konsumsi swasta

AD adalah permintaan aggregat dikurangi ekspor neto

Y adalah GRDP

NX adalah ekspor neto

L adalah tenaga kerja

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa alokasi INPRES tahun 1980/1981 belum menunjukkan hasil yang optimal, khususnya terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan antar daerah. Diketahui juga bahwa pertumbuhan kapital dan produktivitas secara signifikan dipengaruhi oleh

blok INPRES. Dalam persamaan tersebut PDRB dan populasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap konsumsi daerah, Sedangkan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap investasi daerah dan pendapatan kapital tahun sebelumnya bertanda negatif. Sementara itu Stok kapital dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap perubahan PDRB. Kesenjangan tenaga kerja daerah, konsumsi rumahtangga per kapita dan penyebaran transmigrasi berpengaruh positif terhadap migrasi neto. Kesenjangan tingkat pengembalian antar daerah, alokasi blok INPRES dan perubahan GDRP berpengaruh positif terhadap perubahan stok kapital tahun sebelumnya.

d. Susiyati B. Hirawan (1993; 295-317)

Dalam penelitian Susiyati dibahas mengenai hubungan antara spesifik dan blok INPRES dengan beberapa variabel ekonomi. Begitupula dengan konsistensi antara DIP dengan INPRES. Di samping itu dibahas juga mengenai pengaruh INPRES terhadap perekonomian yang meliputi PDRB, investasi dan tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah penduduk mempunyai korelasi yang kuat, baik dengan blok INPRES maupun dengan spesifik INPRES. Sementara itu variabe-variabel kapasitas fiskal yang terdiri dari PDRB perkapita dan PAD perkapita tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Di sisi lain distribusi antara DIP dengan INPRES tidak mempunyai pola yang konsisten. Argumentasi ini mucul karena Jawa yang menerima INPRES perkapita terkecil, sebagai kompensasinya menerima DIP perkapita terbesar. Sedangkan

Kalimantan yang menerima INPRES perkapita terbesar ternyata memperoleh dana DIP terbesar.

Selanjutnya dengan menggunakan "pooling data" Susiyati bertujuan melihat pengaruh INPRES terhadap perekonomian yang diproksi dengan PDRB, investasi dan tenaga kerja.

Tabel 2.1
Pengaruh INPRES Terhadap Perekonomian

Variabel	Konstanta	Total INPRES	Blok INPRES	R^2
PDRB	-749,02	0,083		0,55
PDRB	-1385,60		0,190	0,65
Investasi	-180,951	0,0202		0,37
Investasi	-318,918		0,0437	0,43
Tenaga Kerja	-1366,06	0,080		0,64
Tenaga Kerja	-2452,67	13,638	0,182	0,84

Sumber : Susiyati (1993; 311)

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara statistik INPRES memppunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya terhadap PDRB dan tenaga kerja.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Variabel Penelitian

Selanjutnya dalam Tabel 3.1 secara ringkas disajikan mengenai alokasi DIK/DIP, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD berdasarkan propinsi di Indonesia pada tahun 2000.

Distribusi variable tersebut pada berbagai propinsi di Indonesia relatif bervariasi. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel tersebut dapat diketahui bahwa alokasi Dik/DIP terbesar diperoleh propinsi DKI , diikuti oleh Jabar, Jateng dan Jatim. Sedangkan yang terkecil diperoleh propinsi Maluku.

Sementara itu jumlah penduduk yang terbanyak berada di propinsi Jabar, diikuti oleh Jatim dan Jateng. Sedangkan terendah berada di propinsi Irian Jaya. Luas wilayah terbesar adalah propinsi Jawa Barat dan penduduk miskin terbesar berada di propinsi Jatim, diikuti oleh Jateng dan Jabar. Sementara itu propinsi dengan PAD tertinggi adalah DKI, diikuti oleh Jatim dan Jabar dan terendak dicapai oleh propinsi Sultra.

Secara lebih lengkap mengenai distribusi DIK/DIP, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD berdasarkan propinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Distribusi DIK/DIP Berdasarkan Propinsi di Indonesia

No	DIK/DIP (Rp. Juta)	Penduduk (Juta)	Ls. Wilayah (Km^2)	Pdk. Miskin (Ribu)	PAD (Milyar)
NAD	794840	4010,87	55385,92	602,0	32,80
Sumut	666540	11476,27	70959,32	1972,60	187,60
Sumbar	651147	4228,10	43913,65	601,40	60,40
Riau	628200	4733,95	99747,73	589,90	128,60
Jambi	253025	2400,94	50612,85	677,0	34,20
Sumsel	1146909	1756,51	113339,1	1812,90	79,0
Bengkulu	270160	1405,06	19789,30	302,30	18,50
Lampung	640307	6654,35	35288,59	379,60	57,90
DKI	7601998	8384,85	661,62	2037,10	1692,90
Jabar	2466332	43552,92	43818,18	379,60	448,10
Jateng	1586781	30856,83	327685,3	8393,40	318,60
DIY	478957	3109,14	3185,80	8755,50	57,90
Jatim	1476287	34525,59	46684,17	789,10	510,0
Kalbar	583923	3740,02	148807,0	10286,50	54,10
Kalteng	343994	1801,50	153564,0	1024,10	18,80
Kalsel	304904	2970,24	38822,62	261,70	55,90
Kaltim	352601	2436,55	2114,40	440,20	78,70
Sulut	808515	2820,84	27487,60	786,0	28,40
Sulteng	419090	2066,39	211440,0	228,0	33,0
Sulsel	365267	7787,30	68037,98	599,40	92,10
Sultra	1177421	1771,95	62362,23	1462,10	15,60
Bali	365267	3124,67	38140,0	504,80	229,70
NTB	150786	3821,79	20154,0	257,80	35,70
NTT	219	3929,04	47349,90	1778,70	20,50
Maluku	415972	1200,07	54185,0	669,70	17,40
Irja	540220	2185,51	414040,0	1147,90	32,30
Total	25166207	203528,757	1937072,891	47981,80	3528,68

Sumber : BPS dan DJPKPD, 2001

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Hasil estimasi terhadap persamaan regresi diperoleh hasil sebagai berikut :

DIKDIP = 258562,88 – 8,506 Penduduk + 0,465 Luas Wilayah
+ 7,741 Penduduk Miskin + 4256,329 PAD

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikoliniaritas

Berdasarkan nilai VIF (Variance Inflated factor) untuk keempat variable independent berada di sekitar angka 1 demikian juga nilai Tolerance mendekati 1, berarti model ini bebas dari multikoliniaritas. Begitupula halnya bila dilihat berdasarkan nilai korelasi antar variable independen yang nilainya di bawah 0,5, maka gejala multikoliniaritas antar variable independent tidak terjadi.

2. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh nilai Durbin Watson (D-W) sebesar 2,349. Sedangkan nilai dl sebesar 0,99 dan nilai du 1,64, berarti 2,349 < (4 – 1,64), maka dengan demikian tidak terdapat autokorelasi.

Berdasarkan hasil estimasi terhadap persamaan regresi dari uji F signifikansinya dibawah 0,005 berarti secara bersama-sama variable-variabel tersebut berpengaruh terhadap nilai DIK-DIP yang dialokasikan kepada propinsi di Indonesia. Namun berdasarkan uji t ternyata hanya variable PAD yang

signifikan, namun secara teoritis mempunyai tanda yang berlawan. Begitupula halnya dengan penduduk mempunyai tanda yang berlawanan, namun penduduk miskin dan luas wilayah mempunyai tanda yang sesuai dengan teori.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji F variable independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi DIK/DIP.
2. Sedangkan berdasarkan ujit hanya variable PAD yang sginifikan, namun mempunyai tanda yang berlawanan dengan teori.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak variabel *fiscal capacity dan fiscal needs*
2. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode *pooling*, sehingga mempergunakan data runtun waktu dan *cross section* yang lebih panjang.

Daftar Pustaka Sementara

Chowdhury, Anis and Kirkpartrick, Anis, 1994. Development Policy and Planning; An Introduction to Model and Techniques. Routledge, London.

Esmara, Hendra, 1994. Globalisasi Ekonomi dan Pembangunan Daerah. Prisma 8, Agustus 1994. (pp:37-41)

Hidayat, Tirta dan Damayanti, Destry, 1992. Distributional Effect of Fiscal Decentralization In Indonesia: An Application of a Linked Econometric-IRSAM Model. EKI , Vol. 4 N0.3, 1992.(pp.247-277)

Kuncoro, Mudrajad, 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia; Dilema Otonomi dan Ketergantungan. Prisma No. 4 Thn 1995.(pp: 3-17)

Ma, Jun, 1997. Intergovernmental Fiscal Transfer In Nine Countries; Lessons From Developing Countries. Policy Research Working Paper 1822. The World Bank Economic Institute Macroeconomic Management and Policy Division.

Oates, Wallace E, 1972. Fiscal Federalism. Princeon University, USA

_____, 1999. An Essay On Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. Vol. XXXVII ,September 1999.(pp. 1120-1149).

Ravallion, Martin, 2000. "Monitoring Targeting Performance When Decentralized Allocations to the Poor Are Unobserved"in The World Bank Economic Review, Number 2, Volume 14.

Shah, Anwar, 1994. A Fiscal Need Approach to Equalization Transfer in a Decentralization. Policy Research Working Paper 1289. The World Bank Policy Research Departement Public Economics Division.

Simanjuntak, Robert A, 2000. Beberapa Alternatif Sumber Penerimaan Daerah Dalam rangka Pemberdayaan Pemerintah Daerah. Disampaikan pada Konggres ISEI XIV di Makasar, 21-23 April 2000.

Syafrizal, 2000. Ketimpangan Ekonomi Daerah: "Tendensi Penyebab dan Kebijakan Penanggulangan". Disampaikan pada Konggres ISEI XIV di Makasar, 21-23 April 2000.